

GRATIS
TANPA IURAN

EDISI SELASA
27 JUNI 2023



**HEMAT BIAYA KE JAKARTA,
DARI SINGAPURA NAIK KAPAL**



**TINGKATKAN KONEKTIVITAS KE IKN,
KEMENPUPR BANGUN JEMBATAN DUPLIKASI
BENTANG PENDEK PULAU BALANG**



Pembangunan Jembatan Duplikasi Bentang Pendek Pulau Balang sebagai upaya peningkatan konektivitas ke IKN.

Tingkatkan Konektivitas ke IKN, KemenPUPR Bangun Jembatan Duplikasi Bentang Pendek Pulau Balang

JAKARTA – Konektivitas menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi perhatian pemerintah. Maka wajar jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut, pembangunan Jembatan Duplikasi Bentang Pendek Pulau Balang perlu dilakukan.

"Nanti setelah jembatan ini dioperasikan, tentu sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi volume lalu lintas yang tinggi, juga sebagai jalur logistik. Jembatan ini bagian dari jaringan konektivitas menuju IKN," jelas Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/6).

Danis mengatakan, jembatan duplikasi ini penting untuk melengkapi Jembatan Pulau Balang bentang pendek sekaligus menghubungkan Jembatan Pulau Balang yang sudah selesai pembangunannya.

Jembatan Pulau Balang bentang pendek yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah saat ini memiliki dua lajur. Sedangkan kalau disambungkan dengan Jembatan Pulau Balang yang besar maka menjadi empat lajur. Dengan demikian, perlu ditam-

bah satu jembatan lagi.

Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mulai membangun jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang di Kalimantan Timur. Jembatan duplikasi ini selain menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai jalur utama angkutan logistik juga sebagai salah satu akses menuju IKN.

Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang berada sekitar 500 meter dari jembatan bentang panjang Pulau Balang yang telah selesai pada 2021. Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang dibangun berdampingan dengan jembatan lama sepanjang 470 meter telah rampung pada 2015.

Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang dibangun sepanjang 511 meter dengan tipe rangka baja yang terdiri dari 4 pilar di zona laut dan 4 pilar di zona darat. Konstruksi jembatan mulai dibangun Januari 2023 sesuai kontrak senilai Rp 471 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Adhi Karya-Duta-Jakon (KSO). Saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai 11,6 persen dengan serapan

keuangan 25,5 persen.

Pembangunan jembatan duplikasi yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara ini juga akan meningkatkan konektivitas Jalan Lintas Selatan Kalimantan yang menjadi jalur utama angkutan logistik di Pulau Kalimantan.

Kepala BBPJN Kalimantan Timur Reiza Setiawan mengatakan duplikasi jembatan bentang pendek Pulau Balang akan tersambung dengan jalan tol akses IKN Segmen 5A Simpang Tempadung -Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km yang ditargetkan rampung pada 2024.

Saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan akan melanjutkan perjalanannya ke Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lainnya harus memutar dengan jarak sekitar 80 km dengan waktu tempuh 4 jam.

Alternatif lainnya adalah menggunakan kapal ferry dengan waktu penyeberangan sekitar 1,5 jam belum ditambah waktu antre menuju kapal ferry. Diharapkan dengan dukungan jembatan duplikasi ini akan membantu mempersingkat jarak tempuh, yakni sekitar 30 km dan dapat dilintasi hanya dalam satu jam. **(kn)**



Partai Demokrat membedah buku karya Susilo Bambang Yudhoyono yang berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi.

LEWAT BUKU, SBY SENTIL CAWE-CAWE PRESIDEN JOKOWI

JAKARTA –Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengutarakan pendapatnya. Kali ini, ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyampaikannya melalui buku. Dengan tebal 27 halaman dengan judulnya Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi.

Buku pendapat SBY itu dibedah di kantor DPP Partai Demokrat, Senin, 26 Juni 2023. Dalam bukunya, SBY mengemukakan sejumlah isu. Mulai narasi cawe-cawe untuk kebaikan pemilu, isu keinginan Jokowi soal pilpres diikuti dua paslon, isu Jokowi tidak suka Anies Baswedan, endorsement pada capres tertentu, hingga isu Jokowi sebagai penentu pasangan capres-cawapres.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, buku tersebut berangkat dari kegelisahan SBY melihat fenomena akhir-akhir ini. "Isu tentang cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024 nanti bisa kita jadikan pelajaran. Apa batas-batas kekuasaan itu, sehingga tidak membuat kekuasaan itu menjadi ilegal," ungkapnya.

Mantan menteri pemuda dan olahra-

ga (Menpora) itu menjelaskan, pemimpin negara demokratis harus mengetahui batasan. Karena itu, dalam UUD 1945 ada pasal impeachment (pemakzulan) yang bisa memberhentikan presiden. Regulasi itu menunjukkan bahwa presiden punya batasan tertentu.

Andi menuturkan, boleh saja Presiden Jokowi cawe-cawe dalam pilpres. Boleh juga Jokowi menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasang calon. "Tapi, tidak boleh menggunakan sumber daya negara, instrumen negara, dan fasilitas negara untuk mendukung, memastikan misinya tercapai. Ini yang berbahaya," jelasnya.

Melalui buku tersebut, SBY mengajarkan kepada seluruh kader bagaimana cara mengelola kekuasaan itu sendiri. "Jangan sampai kita melanggar batasan itu dan membuat kita terjerumus," sambungnya.

Buku itu bersampul dominan warna merah dengan tengah hitam. Di bagian atas terdapat kutipan berbahasa Inggris: "The President Can Do No Wrong". Lalu, di bagian tengah tertulis judul besar buku dan di ujung bawah ada tulisan nama Susilo B. Yudhoyono. **(kn)**



Deklarasi Koalisi Masyarakat Sipil menuntut kampanye pemilu bernilai informatif dan edukatif. (ist)

RAWAN TIMBULKAN POLARISASI DAN KONFLIK, ATURAN KAMPANYE DI MEDSOS PERLU DIEVALUASI

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil menuntut kampanye pemilu bernilai informatif dan edukatif. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangeke Muchtar, anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Senin, 26 Juni 2023 mengatakan, salah satu instrumen yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kampanye adalah pengaturan media sosial (medsos). Sebab, medsos memiliki pengguna yang sangat besar.

Berkaca pada pemilu sebelumnya, menurut Adinda, perkembangan dan penggunaan medsos di masa kampanye memunculkan dampak negatif. Yang paling terasa adalah beredarnya informasi palsu atau hoaks dan ujaran kebencian. "Ini memicu polarisasi, konflik, dan penurunan kepercayaan publik terhadap pemilu dan demokrasi," ujarnya.

Dia menilai regulasi, sumber daya, dan infrastruktur penye-

lenggaraan pemilu masih kurang memadai. Karena itu, Adinda mendorong KPU maupun Bawaslu lebih berani dan inovatif dalam membuat peraturan tentang penataan kampanye politik di medsos yang komprehensif. "Diperlukan code of conduct kampanye di medsos. Ini penting agar kampanye di medsos memiliki acuan yang jelas," ungkapnya.

Pernyataan senada disampaikan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia Salabi. Menurut dia, ada banyak hal yang perlu diatur dalam medsos. Sebab, dari sisi hukum masih banyak celah.

Sebut saja, transparansi dan akuntabilitas iklan politik di medsos. Saat ini ada banyak gerakan di medsos. Tidak hanya akun resmi, melainkan juga melalui buzzer. "Perlu ada standar transparansi," tuturnya.

Masalah penataan akun kandidat juga penting. Saat ini, lanjut dia, akun calon dibatasi. Namun, faktanya, ada banyak akun lain milik calon yang tidak didaftarkan. Biasanya, akun yang tidak didaftarkan justru menjadi alat kampanye hitam.

Karena itu, Nurul mengusulkan agar akun calon tidak perlu dibatasi 20 akun seperti yang diatur KPU. Dengan demikian, semua bisa dipantau. "Supaya bisa lebih terlihat apa yang menjadi percakapan oleh parpol dan kandidat. Jadi, nggak perlu juga dibatasi," pungkasnya.

Sesuai jadwal, kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Baik untuk pemilihan umum legislatif (pileg) maupun pemilihan umum presiden (pilpres). Dibanding 2019, masa kampanye Pemilu 2024 relatif singkat. Hanya 75 hari. **(kn)**



Moeldoko mengaku dirinya baru dua kali berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaytun.

BANTAH JADI BEKING AL ZAYTUN, MOELDOKO: MEMANGNYA SAYA PREMAN, ENAK AJA!

JAKARTA – Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaytun rupanya menyeret nama Moeldoko. Kepala Staf Kepresidenan tersebut dituding sebagai pelindung pesantren sehingga seakan-akan tidak tersentuh hukum.

Moeldoko menepis isu itu. Meski demikian, dia tidak mengelak pernah datang ke pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu.

"Memangnya saya preman kok jadi beking? Enak aja," kata Moeldoko yang ditemui di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Juni 2023. Ketika ditanya terkait kedekatannya dengan Panji Gumilang, dia justru mempertanyakan alasan tidak boleh dekat.

Moeldoko berdalih bahwa hubungan dengan Panji Gumilang sebatas kerja. "Kami harus pandai membangun komunikasi. Apalagi, tugas kepala staf kepresidenan itu harus pandai berkomunikasi dengan siapa pun. Kan gitu," ucapnya. Konteks komunikasi dengan Panji, menurut dia, adalah misi politik dan komunikasi publik.

Moeldoko menyatakan bahwa dirinya baru dua kali ke Al Zaytun. Pertama, saat dia menjabat

Pangdam. Lalu, ketika dia menjadi kepala staf kepresidenan. Di sana dia menyampaikan ceramah kebangsaan. "Ya kan domainnya itu," ujarnya.

Ketika ditanya pendapatnya saat berkunjung ke Al Zaytun, Moeldoko menyatakan yang terlihat adalah norma-norma kebangsaan berjalan di pondok pesantren itu. Bahkan, lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Nilai Pancasila juga dibicarakan. "Tapi kan saya tidak mengerti apa yang terjadi secara utuh di dalam," ujarnya.

Dia juga mendorong agar lembaga terkait bertindak. Misalnya, ketika dinilai ada penyimpangan agama karena berkaitan dengan Islam, MUI wajib bertindak. Moeldoko minta agar kasus ini tidak berlarut-larut. "Karena apa? Karena kan ada ribuan anak yang dididik di sana. Kan gelisah itu anak-anak di situ. Harus ada kepastian dari kita," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, kasus Al Zaytun sudah ditangani Kemenko Polhukam. "Ditunggu saja hasilnya," katanya di sela kunjungan kerja di Kebumen,

Senin, 26 Juni 2023. Sejak awal, dia memang menugaskan Kemenko Polhukam untuk mengambil keputusan soal polemik Pondok Al Zaytun.

Pada bagian lain, tim investigasi kasus Al Zaytun yang dibentuk Pemprov Jawa Barat sudah melayangkan rekomendasi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah meminta MUI mengeluarkan fatwa soal dugaan penyimpangan ajaran agama dalam ajaran-ajaran di Pondok Al Zaytun. Sebab, fatwa adalah domain MUI. Bukan dari instansi pemerintahan.

Rekomendasi lainnya adalah tim investigasi meminta pemerintah pusat segera mengambil tindakan atau sikap konkret. Dengan begitu, polemik Pondok Al Zaytun tidak berkepanjangan. Ketua Tim Investigasi KH Badruzzaman mengatakan, tindakan tegas itu bisa berupa tindakan hukum. Selain itu, keputusan administrasi terkait Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan. Dia juga mengungkapkan, selama proses tabayun, Panji Gumilang tidak kooperatif kepada tim. **(kn)**



Hosted by:



INDONESIA JUSTICE CONFERENCE 2023



Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
*** Subject to confirmation*



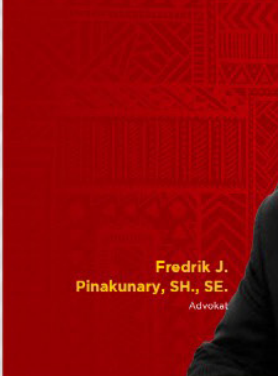
Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum
Hakim Mahkamah Konstitusi



Pdt. Dr. Timotius Arifin Tedjasukmana
Senior Pastor of GBI ROCK Ministry



Mark Mudri
Church Relations SA ACT Bible Society Australia
Chair global council Advocates International



Fredrik J. Pinakunary, SH., SE.
Advokat



Tony Budidjaja, SH., LL.M, Dipl. CI Arb, FCI Arb.
Managing Partner Budidjaja International Lawyers,
Direktur Lawyarinindo Legal Support Center



Dr. Albert Aries, SH., MH
Pengajar FH Universitas Trisakti

OTHER SPEAKERS:

Pdt. Matius Arif Mirdjaja, SH | Dr. Stefanie Hartanto, SH., M.Kn | Pdt. Kongkin Atmodjo
Dr. Linda Bustan, M.Div. | Yonathan Andre Baskoro, S.H., LL.M., M.AP and many more...

THEME

Restoring Justice, Transforming Nation

Amos 5:24 "Tetapi biarlah **keadilan** bergulung-gulung seperti air dan **kebenaran** seperti sungai yang selalu mengalir."



**30 JUNE
- 01 JULY
2023**



**MENORAH HALL
LEMBAH PUJIAN**
JL. ANTASURA - NANGKA UTARA,
DENPASAR UTARA, BALI



**REGISTRATION
FEE:**

1. PROFESIONAL IDR. 300.000
2. PELAJAR DAN MAHASISWA IDR. 200.000



Registration:
<http://tiny.cc/Indojc2023>

Information:
Michelle - 082217014339
Junus BM - 0821 1021 1110



Denada masih bolak-balik Jakarta-Singapura karena sang putri tengah menjalani pengobatan di Singapura.

HEMAT BIAYA KE JAKARTA, DARI SINGAPURA NAIK KAPAL

JAKARTA – Pengorbanan Denada untuk Aisha Aurum, putri semata wayangnya tidak perlu diragukan. Sejak divonis mengidap leukimia sekitar tiga tahun lalu, Aisha kini menetap di Singapura. Menjalani pengobatan sekaligus bersekolah di sana.

Walhasil, Denada harus bolak-balik Jakarta-Singapura. Lantaran pekerjaannya lebih banyak di dapatkan di Jakarta. "Masih, dong. Ini baru ke Indonesia lagi semalam. Jadi, memang balik ke sini karena ada pekerjaan. Kalau nggak, stay di Singapura," kata Denada saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu, 25 Juni 2023.

Menjalani rutinitas tersebut sejak 2020, dia harus putar otak mencari cara untuk menekan pengeluaran. Yakni, mengganti moda transportasi yang biasanya dia gunakan. Awalnya, Denada kerap menaiki pesawat untuk Jakarta-Singapura atau sebaliknya.

Kini putri sulung Emilia Contessa itu menggunakan transportasi laut. "Orang mikir perjalanan aku dari Singapura ke sini cuma 1,5 jam, sebenarnya nggak. Saking menghematnya, aku dari sana ke sini naik kapal feri dulu ke Batam, baru naik pesawat ke Jakarta," jelas Denada.

Dia menyadari, selalu ada risiko dari setiap pilihannya. Meski cara tersebut diakuinya ampuh untuk memangkas budget, pedangdut 44 tahun itu harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga. Sebab, perjalanan tersebut tidak sepraktis ketika dia langsung memanfaatkan jalur udara dari Jakarta.

"Panjang memang. Selama di kapal juga kan aku bawa barang sendiri. Kalau dibilang capek iya, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa syukurku. Malah nambah," terangnya. Denada sedikit berlega. Kondisi putrinya yang kini berusia 11 tahun berangsur membaik. **(kn)**



TERVERIFIKASI DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik

DITEMUKAN DI DALAM PERUT BUAYA

JASAD PRIA
YANG HILANG DI
PERAIRAN KUTIM

BACA HALAMAN 2





Buaya yang berhasil ditangkap oleh Tim SAR Kutim beserta warga setempat saat dibedah.

Tragis, Jasad Pria Hilang di Kutim Ditemukan Dalam Perut Buaya

KUTAI TMUR - Usai dinyatakan hilang di perairan Sungai Lebur, Desa Mandu Pantai Sejahtera pada saat mencari siput pada Minggu (25/6/2023) lalu, seorang pria bernama Sublik (50) akhirnya ditemukan Tim SAR Kutai Timur (Kutim).

Namun tragisnya, jasad Sublik ditemukan mengendap di dalam perut seekor buaya yang berhasil ditangkap oleh sejumlah warga di perairan Desa Mandu Pantai Sejahtera,

pada Senin (26/6/2023) malam.

Sebelumnya, Sublik memang dinyatakan hilang di kawasan tersebut saat hendak mencari siput untuk dijual. Namun nahas, kala ia tengah asyik mencari siput ternyata ada petaka yang menghantui.

Sekejap, Sublik pun hilang entah kemana, hingga yang ditemukan hanya kapalnya saja.

Karena tak kunjung pulang, pihak keluarga pun kemudian melapor-

kan kejadian hilangnya Sublik itu kepada Tim SAR Kutim. Selama dinyatakan hilang, Tim SAR telah melakukan berbagai upaya untuk mencari korban, namun hasilnya tetap nihil.

"Kami sudah terjunkan tim untuk melakukan pencarian terhadap korban hingga malam ini di bantu warga setempat," ucap Kepala Tim Rescue Pos SAR Kutim, Bongga Losong.

Karena tak ada tanda-tanda keberadaan Sublik, petugas gabungan beserta salah seorang pawang buaya kemudian kembali menyusuri sungai. Sekelibas, muncul seekor buaya dari dalam air yang diduga telah menerkam Sublik.

Reptil berukuran cukup besar itupun kemudian ditangkap oleh petugas dibantu warga sekitar untuk dibawa ke daratan. Usai diseret oleh warga sekitar, perut buaya itupun dibelah untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda keberadaan jasad Sublik.

Dan benar saja, nasi sudah menjadi bubur, jasad sublik ditemukan dalam kondisi tak berbentuk dengan kondisi terpotong-potong di dalam perut raksasa air itu.

"Tim SAR Gabungan beserta warga melakukan pembelahan perut buaya dan menemukan korban di dalam perut buaya dalam keadaan MD (meninggal dunia)," ungkapnya.

Dari penemuan tersebut, jasad korban lantas dievakuasi dan dikeluarkan dari dalam perut buaya tersebut dan selanjutnya dibawa oleh tim medis.

Atas ditemukannya korban Tim SAR Kutim kemudian memutuskan untuk mengakhiri operasi pencarian dan kembali ke kesatuan masing-masing.

"Dengan ditemukannya korban maka Ops SAR diusulkan untuk ditutup dan seluruh unsur SAR dikembalikan ke satuannya masing-masing dilanjutkan dengan kesiapsiagaan," pungkasnya. (vic)





TOYOTA

LET'S
GO
BEYOND



PT Satu Indonesia

BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



**Kode Promo
BTSOLI**

DAPATKAN GRATIS 1^l OLI TMO SYNETIC
SETIAP SERVICE BERKALA*



THS Sama Lengkapnya
Dengan Bengkel



Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088



Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



EVENT T3RDEPAN MEDIA KALTIM

**RAMAIKAN
& IKUTI
EVENT
NYA
YUK**

15 JULI 2023



CONVENTION HALL
Kaltim Fest 2023

5-6 AGUSTUS 2023



TENGGARONG
Jl. Bhayangkara Samarinda

12-13 AGUSTUS 2023



TENGGARONG
Jl. Bhayangkara Samarinda

20 AGUSTUS 2023



AREA PARKIR
GOR SEGIRI SAMARINDA

14 JULI 2023



SAMARINDA
Convention Hall

AGUSTUS 2023



ONLINE

20 AGUSTUS 2023



AREA PARKIR
GOR SEGIRI SAMARINDA

INFORMASI :

SAMARINDA
+62 821-5783-0863 - 05348943982
BONTANG
+62 811-5405-033 - 082352365484
TENGGARONG
+62 822-5079-0691



media partners :





Gubernur Kaltim Isran Noor saat melantik 24 PNS di Ruang Ruhui Rahayu, Senin (26/6/2023).

Lantik 24 PNS, Isran Dorong Realisasi Program Pemprov Jelang Akhir Masa Jabatannya

SAMARINDA - Sebanyak 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dilantik oleh Gubernur Kaltim Isran Noor di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (26/6/2023).

Pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari 23 orang PNS yang merupakan hasil dari pengisian jabatan yang kosong dan rotasi antar jabatan. Tujuannya, untuk memperkaya pengalaman dan kompetensi dalam pengembangan karier seorang PNS.

Sedangkan, satu orang PNS diangkat melalui perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional analis perdagangan.

Gubernur Isran Noor dalam sambutannya, mendorong para PNS dalam menjalankan tugasnya untuk mampu membangun budaya kerja yang unggul dan adaptif dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang baik.

"Seperti yang diungkapkan oleh Charles Darwin, bukanlah yang terkuat yang mampu bertahan, melainkan yang paling adaptif dalam merespon perubahan," ungkapnya.

Ia secara khusus juga menyam-

paikan kepada PNS yang baru dilantik, untuk mendukung Isran-Hadi di masa-masa akhir jabatannya menjalankan program Pemprov Kaltim dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang ada.

"Saya mengajak semua untuk bersama-sama mewujudkan realisasi program Pemprov Kaltim dengan memaksimalkan peran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kepemimpinan dalam jabatan masing-masing. Laksanakan semua program dengan baik dan benar sesuai aturan," tandasnya. (eky)



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022



Dr. Ir. H. Idran Noor, M.Si., H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si. Gubernur Kalimantan Wakil Gubernur Kalimantan

PENDAHULUAN

Peng siklus tahunan dalam SWT dan lingkungan tahun ini dan tidak-pada-pada, maka dilaksanakan ke depan dan sebagainya. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang merupakan annual sustainability (Laporan Keberlanjutan) 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah pada 09 April (1) Bulan April-Dari hasil yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan kemampuan keuangan daerah. RLPPD tersebut sebagai bahan masukan perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



3.941.766
JUMLAH PENDUDUK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Visi "Berani untuk Kalimantan Timur Berdaya!"

MISI

1. Bertujuan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing.
2. Bertujuan dalam pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekosistem Kerakyatan yang berkeadilan.
3. Bertujuan dalam pemerataan kebutuhan infrastruktur Kerakyatan.
4. Bertujuan dalam pemeliharaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.
5. Bertujuan dalam penyelenggaraan Misi dan Penyelenggaraan yang Berdaya, Profesional dan Berprestasi.

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indeks Pembangunan Manusia	Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka
76,88 ²⁰²⁰	6,54 ²⁰²⁰	6,83 ²⁰²⁰
2,55%	127,21 ¹⁰⁰	182,92

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH



CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pendidikan	Urusan Kesehatan	Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Urusan Sosial
96,30% Tingkat partisipasi Pendidikan menengah	1,73% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	72,88% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	100% Peningkatan jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat
81,36% Tingkat Penguasaan penduduk dasar	72,88% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	91,15% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	100% Peningkatan jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat
47,65% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	15,08% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	72,72% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	100% Peningkatan jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat
16,83% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	74,51% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	70% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	95,39% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk
77,51% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	13,54% Rasio dan 3 (tiga) MS (Miles) Per 100 penduduk	100% Peningkatan jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat	100% Peningkatan jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat

OPN ATAS LAPORAN KEMAJUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

WTP (Major Tanpa Pengeluaran)

FORMAT MASUKAN

Konfirmasi Pengisian Saran dan Masukan dari Masyarakat Terhadap Ringkasan LPPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022





Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

Dorong Pemerintah Realisasikan Jembatan Kelay III, Ichsan Rapi: Jembatan Sangat Berpengaruh ke Semua Sektor

TANJUNG REDEB- Jajaran legislatif terus mendorong pemerintah untuk merealisasikan Pembangunan Jembatan Kelay III, sebagai akses penghubung ke wilayah pesisir selatan selain Jembatan Sambaliung.

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi mengaku dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Dinas PUPR guna memastikan pembangunan Jembatan Kelay III dapat dilakukan tahun depan.

"Kami sudah dapat informasi dari Pak Sekda bahwa tahun ini ada perencanaan. Tetapi kami dari DPRD ingin memastikan jembatan tersebut sudah dapat dibangun tahun depan," ungkapnya, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer-

ah (APBD) Berau mumpuni untuk membangun Jembatan Kelay III, hal tersebut kembali kepada niat dari pemerintah. Pasalnya, kata Ichsan, meski anggaran tersedia tetapi tidak ada keseriusan, maka rencana tersebut tidak akan terealisasi.

"Kalau ada niat, pasti pembangunan Jembatan Kelay III sudah berproses, buktinya rencana ini sudah sejak lama, namun sampai saat ini belum terealisasi," bebarnya.

Politikus Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menerangkan bahwa pembangunan Jembatan Kelay III memang membutuhkan waktu lama serta menelan anggaran yang cukup besar. Namun, diharapkannya dapat direalisasikan meskipun bertahap.

"Selain di Komisi III, saya juga di badan anggaran. Kami akan terus

suarkan hal tersebut untuk masyarakat," tegasnya.

Dirinyamemaparkan, jika Jembatan Kelay III dapat dibangun, maka akan mendekatkan akses masyarakat limunan dan sekitarnya.

"Jika hanya mengandalkan Jembatan Sambaliung, kualitasnya sudah tidak seperti pertama kali dibangun. Apalagi perbaikan yang ada saat ini tidak secara keseluruhan," imbuhnya.

Selain mendorong pembangunan Jembatan Kelay III, pria yang akrab disapa Daeng Iccang ini juga mendorong adanya alternatif Sambaliung-Gunung Tabur.

"Karena jembatan ini memengaruhi semua sektor. Maka dari itu, saya harap pemerintah dapat memikirkan hal ini," pungkasnya. (adv/dez)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Penyelesaian Tapal Batas, Madri Tegaskan Jangan Sampai Berlarut

TANJUNG REDEB - Persoalan tapal batas Kabupaten Berau dengan Kutai Timur (Kutim) hingga saat ini belum terselesaikan. Hal itu pun disorot Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dia mengatakan, persoalan tapal batas suatu hal yang harus mendapat perhatian serius. Sebab dapat menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

"Seperti timbulnya konflik. Persoalan tapal batas ini sangat serius. Pemerintah jangan membiarkan hal ini berlarut-larut," tegasnya, Senin (26/6/2023).

Dijelaskan Madri, tapal batas dapat memicu konflik karena ada silang pendapat akibat ketidakjelasan wilayah. Baik itu di kampung, kecamatan maupun kabupaten.

"Apalagi jika wilayah yang bermasalah memiliki kandungan sumber

daya alam bernilai tinggi. Tentu hal itu juga dapat menimbulkan konflik," katanya.

Perlu diketahui, saat ini ada enam tapal batas kampung yang belum diselesaikan, dua diantaranya di Kecamatan Teluk Bayur, yakni Kampung Labanan Makmur dan Tumbit Dayak. Sedangkan, empat lainnya di Kecamatan Sambaliung, yaitu Kampung Rantau Panjang, Suaran, Pilanjau dan Buyung-Buyung.

"Pemerintah harus segera dapat menyelesaikan persoalan ini. Jika memang ada kendala, harus segera dicarikan solusinya," ujarnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini menyebut, persoalan tapal batas merupakan permasalahan sejak lama. Namun masih ada yang belum terselesaikan. Bahkan tak hanya di kampung saja, melainkan juga di Kecamatan Segah dan Ke-

camatan Kelay.

"Kalau ada berkas yang belum lengkap, segera dilengkapi agar persoalan tapal batas ini dapat terselesaikan," tuturnya.

"Jangan sampai ada timbul masalah antar masyarakat kampung maupun kecamatan. Ini harus diperhatikan," sambungnya.

Madri Pani berharap persoalan tapal batas Berau-Kutim segera diselesaikan. Palsalnya, jika hal tersebut terus dibiarkan berlarut-larut akan membuat masalah ke depannya.

"Harus segera diselesaikan. Apalagi ini menyangkut dengan wilayah kabupaten. Saya harap segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan konflik antar masyarakat," tandasnya. **(adv/dez)**



Hadiri Festival Bekudung Betiung, Wabup Gamalis: Harus Dilestarikan

TANJUNG REDEB - Upacara adat tahunan Bekudung Betiung kembali dilaksanakan masyarakat Suku Dayak Gaay. Acara tersebut juga sekaligus memperingati ulang tahun Kampung Tumbit Dayak ke-260 tahun.

Festival tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis. Dikatakannya, Bekudung Betiung merupakan tradisi Suku Dayak Gaay yang harus dilestarikan. Terlebih, sudah dilakukan secara turun temurun hingga saat ini.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Apalagi melalui festival seperti ini sebagai bentuk upaya peningkatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Berau,” ungkapnya, Senin (26/6/2023).

Perlu diketahui, Bekudung adalah bahasa Berau, terjemahan dari bahasa Gaai yang artinya pesta syukuran setelah panen. Maka dari itu, Bekudung Betiung digelar untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan.

“Saya harap acara seperti ini dapat menjadi contoh untuk kampung-kampung lainnya yang memiliki potensi kebudayaan. Tentu dengan catatan dipersiapkan semenarik mungkin dengan sektor pariwisata agar dapat menjadi agenda kalendertahunan,” tuturnya.

Menurut Gamalis, selain merawat nilai kebudayaan di Bumi Batiwakkal, melalui festival adat juga dapat memberi dampak positif kepada sektor pariwisata.

“Tetapi yang penting adalah melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, saya harap juga dapat berdampak baik kepada kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya.

Dirinya menyebut, Pemerintah



Wakil Bupati Berau, Gamalis saat menghadiri festival bekudung betiung.

Kabupaten (Pemkab) Berau selalu siap membantu kampung-kampung untuk menggali potensi yang dimiliki. Baik itu dari seni dan budaya maupun pariwisata.

“Kita harus persiapkan semuanya dengan matang, apalagi daerah kita merupakan penunjang wisata Ibu Kota Nusantara (IKN) nantinya. Saya yakin destinasi wisata kita tidak kalah dengan daerah lain,” katanya.

Upaya penyediaan fasilitas kebudayaan juga merupakan komitmen Pemkab Berau melalui salah satu 18 program. Yakni pembangunan kawasan pusat seni, budaya dan kreativitas berupa taman budaya, pembangunan balai adat, serta revitalisasi bangunan bersejarah lainnya.

“Jajaran setiap pemerintah kampung harus dapat meningkatkan potensi yang dimiliki. Apalagi kita

bukan hanya dapat memanfaatkan anggaran Pemkab saja, melainkan juga dari pihak ketiga,” imbuhnya.

Gamalis menyebut, melalui festival budaya Bekudung Betiung itu dapat mengenalkan ke masyarakat terhadap situs-situs bersejarah yang ada di Kampung Tumbit Dayak, seperti salah satunya Tiang Sejarah.

“Ini merupakan suatu hal yang harus didukung. Saya harap acara-acara kebudayaan seperti ini dapat terus dilestarikan,” tegasnya.

Kendati demikian, dirinya berharap nilai-nilai kebudayaan dapat menjadi perhatian seluruh pihak. Sebab, kata Gamalis, dapat memberi dampak baik kepada masyarakat untuk meningkatkan roda perekonomiannya.

“Saya harap semua dapat berkontribusi menjaga nilai sejarah dan budaya yang ada di Berau,” tandasnya. (adv/dez)



Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum

Jelang Iduladha, Gubernur Pastikan Stabilitas Bahan Pokok

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menginstruksikan perangkat daerah terkait melakukan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang perayaan Iduladha.

“Hal ini dalam upaya kita menjaga harga bahan pokok tetap stabil menjelang Iduladha 1444 H, yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Salah satu adalah melaksanakan operasi pasar di sejumlah titik,” kata Gubernur.

Tim gabungan Pemprov Kaltara terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop UKM), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Biro Perekonomian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara.

Sementara itu, Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara, Hj Hasriyani tim gabungan telah melakukan serangkaian kegiatan operasi pasar sekaligus mengecek ketersediaan bahan pokok.

“Antisipasi menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam menjaga kestabilan harga menekan inflasi jelang Iduladha 29 Juni mendatang, kita melakukan operasi pasar,” tutur Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hj Hasriyani.

“Sekaligus kita cek ketersediaan stok seperti daging sapi dan daging ayam beku,” ucapnya.

Alhasil harga kebutuhan pokok dan barang penting naik turun atau tidak menentu. Seperti harga daging ayam yang sebelumnya Rp 60.000 per kilo, saat ini mengalami penurunan di kisaran Rp 50.000 - Rp 52.000 per kilo. Daging sapi dijual seharga Rp 160.000 - Rp 170.000, masih stabil seperti sebelumnya.

Sedangkan komoditi lainnya, seperti bawang merah mengalami kenaikan menjadi Rp 43 - 45 ribu per kilo dari harga sebelumnya Rp 35 ribu per kilo. Sementara, bawang putih mengalami penurunan menjadi Rp 43 ribu per kilo dari harga biasanya Rp 45 ribu per kilo.

Menurut Hasriyani, hambatan distribusi menjadi salah satu faktor terganggunya kestabilan harga bahan pokok. Dengan ditanganinya permasalahan tersebut, ketersediaan bahan pokok dapat mencukupi permintaan masyarakat.

“Untuk daging ayam, Kaltara masih mengandalkan pengiriman dari luar daerah. Jadi, harga berpengaruh terhadap jarak, waktu dan ongkos kirim. Kalau ayam yang baru-baru ini didatangkan, sebanyak 1,4 ton. Itu didatangkan dari Samarinda,” bebarnya.

Terkait hal tersebut, Kepala DPKP Kaltara, Heri Rudiyo mengaku pihak telah melakukan komunikasi dengan Badan Pangan Nasional (BPN) untuk mensubsidi ongkos angkut dari Samarinda ke Bulungan.

“Nanti akan kita upayakan untuk subsidi ongkos angkut transportasinya, semisal yang dari Samarinda ke sini (Bulungan, red). Termasuk juga dari Berau, yang penting harga disini wajar,” katanya. (dkisp)



PENGARAHAN: Sekprov Dr H Suriansyah saat pimpin Apel Pagi di Lingkungan Pemrov Kaltara, Senin (26/6) pagi. Dalam kesempatan itu, ada beberapa arahan yang disampaikan Sekprov Kaltara terhadap jajaran Pemerintahan yang ada saat ini.

Sekprov Kaltara Minta Serapan Anggaran Dipacu

TANJUNG SELOR - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr. H. Suriansyah, M.AP memimpin Apel Pagi di Lapangan Agathis Tanjung Selor, Senin (26/6/2023). Apel pagi diikuti Asisten, Staff ahli gubernur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para ASN dan Non-ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltara.

Dalam kesempatan itu, ada beberapa arahan yang disampaikan Sekprov Kaltara terhadap jajaran Pemerintahan yang ada saat ini.

Pertama, yang menjadi atensi Sekprov Kaltara menyangkut serapan anggaran. Ia meminta kepala OPD Pemrov Kaltara pacu penyer-

apan anggaran.

"Sesuai arahan bapak Gubernur, serapan anggaran agar dipacu. Jangan ditunggu-tunggu, jangan sampai ada pekerjaan yang tertunda atau sebagainya," ujar Sekprov Suriansyah.

Kedua, segera bersiap untuk menyusun APBD Perubahan tahun 2023. "TAPD segera membahas, lalu terkait rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 segera ditindaklanjuti," pintanya.

Ketiga, dalam hal pelayanan publik. Sekprov Kaltara menginginkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)

di wilayah Pemerintah Provinsi Kaltara untuk terus berinovasi dan berkreasi.

Berbagai terobosan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilakukan. Menurutnya, inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan.

"Tak hanya pelayanan publik, tapi bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, para mentor agar terus melakukan pembinaan dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan," tutup Sekprov. (dkisp)



PARIPURNA: Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kaltara, Senin (26/6).

Dua Raperda jadi Pembahasan Pada Paripurna

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr Yansen TP, M.Si menyampaikan nota pengantar 2 rencana peraturan daerah (Raperda) pada rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Senin (26/6).

Dua raperda tersebut meliputi Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Serta, Raperda Pajak dan Retribusi Daerah.

Wagub Yansen mengungkapkan, pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah daerah. Tujuannya untuk membiayai pembangunan wilayah.

“Perlu diketahui bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 terdapat penambahan objek pajak dan rasionalisasi objek retribusi yang mewajibkan peraturan daerah untuk segera disesuaikan,” kata Wagub Yansen.

Merujuk pada pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, perubahan dan penambahan dalam penggolongan pajak yang dipungut daerah provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air

Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB).

“Opsen ini diharapkan memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di daerah dan meningkatkan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak,” terangnya.

Sedangkan untuk retribusi daerah terdiri dari 3 objek retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Karena itu, berdasarkan kebutuhan daerah maka perlu penyesuaian Perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Agar dapat melakukan transformasi sosial demokrasi yang mampu menjawab perubahan globalisasi serta tercipta pembangunan yang berkesinambungan.

Berikutnya, Raperda tentang Pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD 2022. Wagub mengungkapkan, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

“Alhamdulillah pemeriksaan BPK yang selesai tanggal 16 April 2023

menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesembilan kali berturut-turut semenjak 2014,” jelasnya.

Dalam paparannya, Wagub menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp2.553.547.049.717 dan target terealisasi sebesar Rp2.731.491.817.451,50 atau sebesar 106,97 persen dari target yang ditetapkan.

Pada realisasi belanja daerah Wagub menyampaikan target belanja sebesar Rp2.801.657.759.512,00 Rupiah dan terealisasi sebesar Rp2.553.577.991.131,02 atau sebesar 91,15 persen.

Selain realisasi belanja daerah, terdapat realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan penerimaan pembiayaan dimana realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp246.200.110.390,87 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 dan pengeluaran pembiayaan sebesar 15 Milyar Rupiah merupakan penyertaan modal kepada Bank Kaltimara sehingga pembiayaan daerah netto sebesar Rp231.200.110.390,87. (dkisp)



YAHYA/MEDIA KALTIM

Wakil Wali Kota, Najirah bersama Sekda Bontang tengah memantau harga bahan pokok di pasar Tamrin.

Wawali Bontang Pantau Harga Bahan Pokok Jelang Iduladha, Harga Masih Terjangkau

BONTANG – Wakil Wali Kota ikut memantau bahan pangan kebutuhan pokok jelang Iduladha 1444 hijriah. Pantauan bersama diikuti Sekretaris Daerah, kepala Diskop UKMP dan forum pimpinan daerah di pasar Taman Rawa Indah (Tamrin) pada Senin (26/6/2023).

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mengatakan beberapa harga bahan pokok jelang Iduladha masih dalam keadaan normal dan tidak mengalami kenaikan harga signifikan. Ia mengatakan pantauan harga jelang Iduladha masih terjangkau oleh masyarakat.

“Memang harga masih stabil seperti harga daging dan ayam. Namun ada kenaikan sedikit pada harga telur, cabai dan bawang,” jelas Najirah kepada awak media, Senin (26/6/2023).

Najirah menambahkan ketersediaan stok bahan pangan menjelang Iduladha hingga saat ini masih ter-

bilang aman.

“Masih normal dan kenaikannya tidak tinggi. Hanya cabai memang yang alami kenaikan. Karena jelang lebaran (Iduladha) yang dibutuhkan masyarakat itu daging dan ayam,” sebut Najirah.

Selain itu, Najirah juga akan mengevaluasi dan tindak lanjut terkait mengenai sepiunya pengunjung ke pasar taman rawa indah (Tamrin).

Sementara Sekda Bontang, Aji Erlynawati mengatakan saat ini inflasi memang terjadi di Kalimantan Timur sebesar 4 persen. Untuk Kota Bontang sendiri terjadi inflasi sebesar 4,06 persen.

“Ada memang kenaikan hanya sedikit. Memang komoditas yang naik setiap menjelang hari raya keagamaan memiliki dampak inflasi seperti cabai dan bawang,” tambah Aji Erlynawati.

Salah satu pedagang telur, Hj Mur-

ni mengatakan harga telur saat ini berkisar Rp 65-68 ribu per/kg yang memang masih harga normal.

“Harga 65 ribu, paling besar 68 ribu,” kata Murni.

Pedagang daging lainnya, Sumarno mengatakan harga komoditas daging sapi masih terbilang normal di angka harga 160 ribu. Ia mengatakan stok daging sapi yang dijual didapatkan dari Rumah Potong Hewan (RPH) berkisar hingga 80kg.

“Tidak ada sampai kenaikan, mudah-mudahan tidak ada. Paling hari-hari akhir baru naik, sebesar Rp2 ribu sampai Rp5 ribu,” kata Sumarno.

Untuk diinformasikan harga bahan pokok seperti harga beras saat ini Rp14ribu/kg, harga telur Rp65-68 ribu/piring, harga ayam Rp55 ribu-60 ribu/ ekor, harga daging Rp160 ribu/kg dan harga cabai Rp45 ribu/kg. (adv/yah)



YUSVA ALAM

Asesoris untuk percantik Malahing.

Saran-saran dari Juri ADWI untuk Pengembangan Wisata Malahing

BONTANG – Tak hanya keungulan yang disampaikan Tim Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023, namun beberapa saran pun diutarakan tim juri yang terdiri dari Agus Wiyono dan Mangkukandia itu. Agar ada pembenahan Kampung Malahing, sehingga mampu meningkatkan nilai pariwisatanya.

Beberapa saran-saran membangun itu disampaikan Agus Wiyono, di antaranya:

Satu, butuh penguatan kelembagaan.

Dijelaskan Agus, kelembagaan ini menjadi penyakit umumnya desa wisata, tak hanya di Malahing. Kelembagaan ini masih kurang dimaksimalkan oleh desa wisata termasuk di Malahing.

Menurutnya, Malahing perlu membuat lembaga yang khusus

menangani pariwisata di kampung pesisir itu. Diisi oleh SDM-SDM yang handal di bidang pariwisata, serta membuat masterplan yang jelas dan terperinci. Bagaimana merencanakan daya tarik wisata baik jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

“Kalau lembaga itu bisa terwujud dan memiliki masterplan jelas, saya kira ikut di lomba skala Asia hingga dunia itu perkara gampang. Karena semua indikator bisa tercapai,” ujar Agus.

Dua, pengembangan produk.

Menurutnya potensi yang dapat dikembangkan di Malahing sangat banyak, namun produk yang dihasilkan masih sedikit. Produk tak hanya terkait kuliner atau souvenir namun juga paket wisata.

Pengembangan wisata di Malahing masih berbasis tiket bukan pa-

ket. Padahal menurutnya jauh lebih bermanfaat kalau berbasis paket.

“Kalau hanya tiket masuk saja, yang didapat ya hanya harga tiket perorangan itu saja. Sementara kalau paket wisata bisa dapat semua termasuk tiket itu juga. Contohnya kalau disediakan paket wisata di Malahing senilai Rp 250 ribu, di dalam paket itu ada harga tiket, biaya makan, nginap, dan sebagainya,” bebernya.

Ditambahkan Agus, Malahing bisa juga membuat paket wisata perjalanan antar kampung pesisir. Malahing bisa kerjasama dengan Bontang Kuala atau Selangan dan kampung pesisir lainnya.

“Kampung di atas laut kayak gini bisa dihitung jari, gak sampai 10 jari udah habis. Artinya unik banget. Karena unik orang cari itu,” imbuhnya. (adv/al)



YUSVA ALAM

Backdrop penyambutan Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf RI, Indra Ni Tua dan Tim Juri ADWI 2023 di Malahing, Agus Wiyono (kanan) dan Mangkukandia.

Tim Juri Independen, Pemenang ADWI Diikutkan Lomba Skala Asia

BONTANG - Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf RI, Indra Ni Tua menyebutkan, para pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 akan diumumkan sekira akhir Agustus atau awal September. Namun hal itu belum dipastikan, lantaran penilaian belum rampung seluruhnya.

Dikatakan Indra, agar bisa mengumumkan para pemenang, tim juri harus menyelesaikan penilaian di seluruh desa yang masuk 75 besar ADWI 2023. Para juri akan menilai dari dokumen-dokumen yang diberikan serta informasi yang didapatkan.

"Penilaian di Kampung Malahing ini baru yang ke-47, masih banyak yang belum dinilai," ujar Indra.

Dikatakannya, ke-75 desa wisata

yang masuk di ADWI 2023 ini sudah yang terbaik. Namun nantinya para pemenang akan dibantu promosi oleh Kemenparekraf RI. Caranya bekerjasama dengan berbagai mitra strategis Kemenparekraf RI.

"Ada perusahaan seperti BCA, Astra, Tiktok, hingga Tarveloka. Selain itu juga pemenang akan diikutkan lomba skala Asia," sebutnya.

Sementara itu, salahsatu Tim Juri ADWI 2023, Agus Wiyono menambahkan, dari 75 besar desa wisata di ADWI 2023 ini akan dicari pemenang di masing-masing 5 kategori penilaian. Dari masing-masing kategori akan ada juara 1,2, dan 3. Ditambah lagi dengan juara favorit.

"Juara 1 favorit, dimana setiap desa wisata akan dibuatkan video lalu akan diupload di platform

Jadesta (jaringan desa wisata). Vote paling banyak akan jadi juara favorit," beber Agus.

Ia menjelaskan cara penilaian tim juri, yaitu akan menilai berdasarkan 5 kategori. Masing-masing kategori terdapat kurang lebih 30 indikator penilaian dan memiliki indikator yang berbeda-beda.

Ia juga memastikan bahwa semua juri profesional dan independen. Terpisah dari Kemenparekraf RI. Para juri merupakan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di bidangnya.

"Ada profesor, dosen, praktisi, hingga jurnalis. Latar belakangnya beda-beda. Setiap desa hanya 2 juri yang datang," pungkasnya. (adv/al)



YUSVA ALAM

Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf RI, Indra Ni Tua didampingi Wali Kota Bontang, Basri Rase saat mengunjungi beberapa cottage di Malahing.

Ini Keunggulan Malahing yang Belum Diketahui Banyak Orang

BONTANG – Tim Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 menilai Kampung Malahing, Sabtu (24/6/2023) lalu. Tim Juri ADWI tersebut datang bersama Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf RI, Indra Ni Tua beserta tim kreatif yang akan membuat video Kampung Malahing.

Dari hasil penilaian 2 orang tim juri yang terdiri dari Agus Wiyono dan Mangkukandia, dibebaskan beberapa poin keunggulan Kampung Malahing dibandingkan dengan desa-desa wisata lainnya, yang berhasil masuk 75 besar desa wisata di ADWI 2023.

Beberapa keunggulan Malahing di antaranya:

Satu, Kampung Malahing merupakan satu-satunya yang berada

di atas laut. Sementara semua desa wisata lainnya berada di darat.

“Salahsatu atribut penting di sini itu rumah di atas laut. Gak ada bandingannya dengan 74 desa terbaik lainnya. Semuanya di darat, ini yang paling unik karena di atas laut. Atribut penting yang paling kuat di malahing sementara ini,” ujar Agus saat diwawancara oleh media ini.

Dua, Kampung Malahing disamakan dengan Bali dan Maldive lantaran memiliki banyak cottage.

“Kalau di Bali cottage kayak gini bisa Rp 10 juta per malam. Adanya cottage ini bisa jadi menambah nilai wisata di Malahing,” ungkap Mangkukandia.

Tiga, Kampung Malahing nol sampah plastik.

“Di sini desa wisata paling bersih

karena nol sampah plastik. Pertahankan nol plastik, agar airnya tetap biru. Mari kita bersahabat dengan alam. Kita harus belajar dari alam. Alam tidak perlu manusia, manusia yang perlu alam,” imbuah Mangkukandia.

Empat, kesadaran masyarakat akan hidup bersih tinggi.

Menurut Agus, kategori tamu yang bisa disasar Malahing adalah domestik midle up (menengah ke atas). Lantaran kesadaran masyarakatnya akan hidup bersih terbilang baik.

“Biasanya kalau kampung-kampung kayak gini kumuh, bau, kotor. Ini modal sosial yang bagus untuk dikembangkan. Masyarakatnya bagus kesadarannya,” ucapnya. (adv/al)



DOK HUMAS SATPOL-PP PPU

Personel Satpol-PP PPU saat melakukan patroli penegakkan aturan.

Inovasi TEGAS, Satpol-PP PPU Mengadaptasi Penegakkan Perda dan Perkada di Kota Bogor

PPU - Satpol-PP Penajam Paser Utara (PPU) akan menerapkan sistem tindak pelanggaran di tempat dalam waktu dekat. Inovasi ini mengadaptasi program yang ada di beberapa kota di Pulau Jawa.

Penerapan itu dalam rangka implementasi aksi perubahan Tim Penegakkan dan Penindakan Yustisi Sistem Peradilan di Tempat (TEGAS).

Plt Kepala Satpol-PP PPU, Arifin mengatakan hal tersebut salah satu upaya untuk meningkatkan ketertiban umum dalam menegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) serta melindungi masyarakat.

Adapun program ini merupakan inovasi baru yang ada di satuan ini.

"Ada terobosan dari Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Abdul Gapur), yakni akan menerapkan tindak pelanggaran di tempat," katanya Senin (26/6/2023).

Ia menjelaskan tindak pelanggaran di tempat dilakukan saat personel Satpol-PP PPU dalam melaksanakan tugas penegakan didapati adanya pelanggaran kategori rindak pidana ringan. Nantinya pelanggaran tersebut langsung ditindak di tempat.

"Contohnya, ketika pelanggaran ini terkena denda. Nah, langsung didenda di tempat. Hal ini kami harap dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggaran," jelasnya.

Adapun implementasi aksi perubahan ini dilaksanakan dalam dua tahapan. Dimulai pada tahun ini un-

tuk persiapan hingga optimalnya pada 2024 mendatang.

Arifin meyakini adanya terobosan ini bakal mampu menurunkan adanya pelanggaran. Sejalan dengan terciptanya lingkungan yang aman dan tertib di tengah masyarakat.

Apalagi, program penegakan di tempat tersebut baru dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti Kota Bogor, Bandung dan Kota Salatiga.

"Inovasi ini terinspirasi saat studi banding di Jakarta beberapa waktu lalu. Bahwa Kota Bogor yang wilayahnya berdekatan saja bisa melakukan program tersebut. Jadi program ini kita lakukan juga di PPU," pungkas Arifin. (adv/sbk)

Lagi, Bangkai Sapi Ditemukan di Perairan Balikpapan

BALIKPAPAN - Warga RT 25 Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan kembali dikejutkan oleh bangkai sapi di laut. Pasalnya, aroma busuk tercium hingga perkampungan warga, Senin (26/6/2023) sekitar pukul 13.30 WITA.

Salah seorang warga, Putri (38) mengatakan, sejak Minggu (25/6/2023) malam warga telah mencium aroma bangkai. Namun saat dicari tak dapat menemukan sumber bau menyengat tersebut. "Nah, pas paginya bapak Lubis ke laut lihat sudah ada bangkai sapi. Itu diikatnya biar nggak ke mana-mana," ujarnya.

Tidak hanya satu ekor bangkai sapi yang ditemukan warga. Melainkan dua ekor bangkai yang ditemukan. Dan kondisinya pun sudah membusuk. "Yang satu itu coklat yang satu lagi hitam tapi larut dibawa ombak sudah," jelasnya.

Sebelumnya pada Senin (26/6/2023) pagi warga di kawasan Pasar Klandasan, Balikpapan Kota juga menemukan bangkai sapi di pantai. Dan sudah dikuburkan saat itu juga.



Penemuan bangkai sapi oleh warga.

Hingga saat ini sudah ada 3 ekor bangkai sapi yang ditemukan warga di laut. Kuat dugaan sapi tersebut dibuang dari atas kapal. **(bom)**

Hari Pertama PPDB Jaringan Padat, Kepsek SMPN 6 Balikpapan : Sabar, Banyak yang Daftar Juga

BALIKPAPAN - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 untuk jenjang SD dan SMP Negeri di Kota Balikpapan sudah mulai dibuka sejak Senin (26/6/2023) pada pukul 08.00 WITA.

PPDB tahun ajaran 2023 dilakukan secara online, namun masih nampak sejumlah orangtua murid yang mendatangi sekolah-sekolah untuk mencari informasi hingga menanyakan jaringan pendaftaran melalui online tersebut.

Ramlah, salah satu orangtua murid mengatakan, sejak pukul 08.30 WITA dirinya sudah mencoba melakukan pendaftaran melalui situs yang diberikan pihak sekolah. Namun hingga pukul 09.15 WITA, data yang di uploadnya tak berhasil diterima website.

"Sudah mas, sejak dari tadi sudah saya upload-upload tapi nggak bisa. Gagal mulu, makanya saya ke sini mau konfirmasi ke guru," ujarnya.

Lebih lanjut Ramlah menjelaskan, saat dirinya bertanya kepada guru piket, ia disuruh kembali mencoba melakukan upload berkas-berkas yang diminta sebagai syarat.

"Ya disuruh nunggu dan coba lagi sama guru yang piket itu," jelasnya.



Suasana pendaftaran PPDB di SMPN 6 Kota Balikpapan di hari pertama.

Sementara itu salah seorang orangtua lainnya, Siti Aisyah mengaku justru terbantu dengan pendaftaran online ini. Meski awalnya ia sempat panik karena link pendaftaran tidak bisa di buka hingga pukul 09.00 WITA.

"Awalnya memang nggak bisa saya akses. Error terus. Saya datang kesini di kasih tau disuruh ulang lagi. Tapi Alhamdulillah sudah bisa," jelasnya.

Dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Balikpapan, Suwiyadi mengatakan, sulitnya di akses website PPDB serta sering gagalnya mengupload file syarat PPDB di

hari pertama dan jam awal disebutnya hal tersebut wajar.

"Ya wajar aja lah ya, kan yang akses mau daftar ini ratusan, bahkan ribuan kalau se-Balikpapan ini," ujarnya.

Suwiyadi menjelaskan, orangtua murid diminta tetap tenang dan tak perlu khawatir soal pendaftaran PPDB ini. Hal ini dikarenakan masa pendaftaran berlangsung selama 24 jam hingga 30 Juni 2023.

"Nggak perlu panik lah ya, kan masih bisa ntar malam atau besok. Jadi servernya nggak sibuk," jelasnya. **(bom)**



7 rumah di RT 52 Kelurahan Gunung Bahagia yang terendam air selama satu pekan.

Sudah Sepekan 7 Rumah di Griya Permata Asri Terendam Air

BALIKPAPAN - Sebanyak 7 rumah di kawasan Perumahan Griya Permata Asri tepatnya di RT 52 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan terendam air setinggi satu meter nyaris sepekan lamanya.

Salah seorang warga terdampak, Kamalia (38) mengatakan, kondisi ini bermula dari hujan deras yang melanda Kota Balikpapan pada Selasa (20/6/2023) lalu. Karena drainase tertutup oleh proyek pengupasan lahan di bagian sebelah kompleks Perumahan Griya Permata Asri, maka air tidak dapat mengalir.

"Selasa lalu itu hujan deras, karena di sebelah (Perumahan Daun

Village) lagi ada pengerjaan makan-nya saluran airnya nggak jalan," ujarnya, Senin (26/6/2023).

Lebih lanjut Kamalia mengatakan, sejumlah rumah yang terdampak pun harus meninggalkan rumahnya. Karena air yang sudah mengeluarkan aroma tak sedap.

"Saya ngungsi ke rumah tetangga sekarang. Kemarin-kemarin di masjid, karena ini sudah seminggu nggak ada hasilnya," jelasnya.

Sementara itu Ketua RT 52 Kelurahan Gunung Bahagia, Tati mengatakan, perihal kondisi ini sudah di laporkan kepada pengembang perumahan, kelurahan hingga ke-

camatan. Namun, sampai saat ini belum juga mendapat respon.

"Sudah ada dua kali pertemuan. Tapi nggak ada hasilnya juga sampe sekarang. Katannya mau disedot airnya atau di sebelah itu mau di buat jalan air dulu sementara," ujarnya.

Tati berharap, permasalahan ini bisa segera teratasi. Palsanya, 18 jiwa dari 4 kepala keluarga (KK) yang terdampak ini sudah mulai tidak sehat.

"Anak-anak sudah ada yang gatal-gatal itu. Dan aroma bau ini kan juga nggak sehat buat rumah sekitar lainnya," tutupnya. (bom)

Camat Pastikan Air Genangan di Perum GPA Segera Teratasi

BALIKPAPAN - Sudah nyaris sepekan lamanya 7 rumah di Perum Griya Permata Asri (GPA) terendam air. Yakni, sejak 20 Juni 2023 lalu hingga Senin (26/6/2023) ini. Aroma bau tak sedap pun mulai muncul di genangan air setinggi kaki orang dewasa.

Camat Balikpapan Selatan, Muhammad Hakim mengatakan, pemerintah telah meminta kepada pengembang Perumahan Daun Village untuk membuat saluran air sementara hingga kondisi air di RT 52 Kelurahan Gunung Bahagia benar-benar hilang alis kering.

"Kita sudah komunikasikan sama yang di Daun Village ini agar dibuatkan sementara aliran drainasenya sampai airnya kering," ujarnya, Senin (26/6/2023).

Lebih lanjut Muhammad Hakim menjelaskan, pembuatan saluran air atau drainase dari Perumahan Daun Village ini sifatnya hanya sementara. Karena pemanfaatan lahan di kawasan tersebut merupakan hak bagi pengembang Perumahan Daun Village.

"Memang dia lagi buka lahan dan berdampak sama Perumahan Griya Permata Asri yang di sebelahnya. Tapi ini hak Daun Village kan," jelasnya.

Pemerintah Kota Balikpapan pun telah meminta pengembang Perumahan Griya Permata Asri untuk segera mencari solusinya untuk warga yang tinggal di kawasannya.

"Cobalah dia buat bozem atau bendali di kompleknya, ini kita lihat nggak ada sama sekali, dan airnya langsung di buang ke sini aja," tambah Muhammad Hakim.



Camat Balikpapan Selatan, Muhammad Hakim

Hakim pun memastikan untuk genangan air yang ada saat ini, paling lambat sore atau malam sudah bisa dialiri atau disedot dan dibuang ke lokasi lain, sehingga warga yang terdampak pun bisa kembali ke rumahnya.

"Mudah-mudahan sore atau paling lama ntar malam lah bisa di keringkan airnya. Ini kan lagi dibuatkan salurannya kalau memang masih terkendala kita sedot dan buang ke lokasi lain dulu," tutupnya. **(bom)**

LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Beringkat No. 116A, Bontang Baru, Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive
Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD
APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

member of ASTRA



ISTIMEWA

Rekan korban, Ady, saat menceritakan kronologi tenggelamnya Pebriansyah, pemuda di Desa Loa Raya.

Berenang ke Tengah Sungai Mahakam, Pemuda di Loa Raya Tenggelam karena Kelelahan

TENGGARONG - Nasib malang menimpa Pebriansyah, pemuda berusia 25 tahun di RT 5 Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar). Korban dilaporkan tenggelam, saat berenang di tengah Sungai Mahakam, pada Senin (26/6/2023), sekitar pukul 11.30 WITA.

Dari keterangan teman korban sekaligus saksi mata, Ady Ariansyah, saat itu korban melihat ada drum yang hanyut di tengah Sungai Mahakam. Di saat itulah korban bergegas ingin mengambil dan membawa drum tersebut ke pinggir keramba milik korban.

Namun, saat berenang dan sesampainya di drum, korban tampak kelelahan karena berenang. Ditambah kondisi arus Sungai Mahakam yang juga pada saat itu sedang deras. Padahal dirinya sudah beru-

saha melarang korban untuk mengambil drum tersebut, tetapi tidak digubris sama sekali.

Karena melihat korban yang tampak kelelahan sambil berpegangan dengan drum, akhirnya dirinya pun terjundand berniat menolong korban untuk kembali ke pinggir. Sembari meminta korban membiarkan drum itu terus larut.

"Pasketemu Pebri, saya suruh lepas saja drumnya, dia bilang jangan dan sayang dilepas, akhirnya saya tidak tahan kembali ke keramba lagi," ujar Ady menceritakan.

Ady pun melanjutkan, sempat meminta tolong dengan perahu ces yang lewat sambil menunjuk lokasi korban. Namun karena pemilik perahu ces yang tidak paham, membuatnya berlalu dan terus melanjutkan perjalanannya.

Akhirnya Ady pun bersama teman

lainnya, berinisiatif mengambil perahu ces dan mendatangi korban. Namun nahas, saat drum diangkat, korban sudah tidak ada lagi. "Tapi pas diangkat drumnya, korban sudah tidak ada," tutup Ady.

Di sisi lain, Kalak BPBD Kukar, Fida Hurasani, menyebut sudah menurunkan personelnya di lokasi TKP yang berada 15 meter dari pinggir ke tengah sungai. Dengan langsung melakukan proses pencarian hingga radius 10 kilometer (km) ke arah hilir Sungai Mahakam. Lantaran kondisi arus Sungai Mahakam yang terpantau deras.

"Diperkirakan korban mengalami kelelahan, menurut saksi di lapangan seperti itu," beber Fida.

"Selain BPBD Kukar, saya juga sudah monitoring rekan Satpol PP karena mereka punya sapsas perahu karet," tutup Fida. (afi)



ISTIMEWA

Lokasi yang diduga tenggelamnya Aldiansyah, bocah 11 tahun asal Tenggarong Seberang.

Pemdes Sudah Menegur, Pemilik Wisata Danur Dana Tak Ada Komunikask dengan Dispar Kukar

TENGGARONG - Teguran untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan pengunjung, sudah dilayangkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, kepada pemilik tempat wisata Danau Danur Dana. Memastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Namun, hingga pada akhirnya, salah satu pengunjung yang berusia 11 tahun, Aldiansyah, tenggelam saat sedang asyik bermain, pada Minggu (25/6/2023) kemarin sekitar pukul 14.00 Wita. Diketahui, Aldiansyah merupakan warga Desa Manunggal Daya, Kecamatan Tenggarong Seberang yang sedang menghabiskan waktu akhir pekan bersama orang tuanya.

Kades Perjiwa, Erik Nur Wahyudi, menyebut tempat wisata itu merupakan milik swasta, yakni milik Kim Pan Cheol. Yang memanfaatkan danau eks galian tambang yang tutup pada 2005 lalu. Dibuka dan dikembangkan menjadi tempat wisata pada 2022 lalu.

"Kita sudah ingatkan (terkait) keamanan beberapa kali, termasuk dengan pak Alif DPRD Kukar, tapi

tidak digubris. Kita di pemdes tidak ada terlibat pengelolaan, perizinan cuma minta surat keterangan usaha," ujar Erik.

Langkah tegas pun coba dilakukan, dimungkinkan dengan menutup lokasi wisata agar tidak terulang kembali. Namun, Erik tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Perlu ada pembahasan dengan duduk bersama. Baik itu Pemdes Perjiwa sendiri, DPRD Kukar dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar. Untuk berunding lebih lanjut.

"Secepatnya kita akan rapat, mungkin libatkan tokoh juga. Kita akan bahas masalah ini, dan akan kita sampaikan bahwa kita bersama wakil ketua DPRD sudah mengingatkan pengaman. Sementara kita dulu, baru panggil pengelola wisata," lanjut Erik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Slamet Hadiraharjo, memastikan pihaknya sudah langsung meninjau lokasi Danau Danur Dana, dengan mengugaskan sekretaris Dispar Kukar. Ia pun menyebut, semenjak tempat wisata yang memanfaatkan danau eks galian tambang tersebut, tidak

pernah menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Dispar Kukar.

"Mereka gak pernah komunikasi kalau ada tempat wisata di sana, meski dibuka sejak akhir 2022, belum ada koordinasi sama kami," jelas Slamet.

Ia pun lebih memberikan penekanan kepada seluruh pemilik dan pengelola wisata yang serupa. Yakni menyiapkan dan meningkatkan keselamatan dan keamanan pengunjung. Disamping menyiapkan dan membekali tenaga ahli yang memang siap dan sigap pada kasus seperti yang terjadi pada Minggu (25/6/2023) kemarin.

"Pemilik harus tegas, perlu ketegasan pengelola untuk meminta masyarakat atau pengunjung untuk menggunakan alat keselamatan (pelampung) yang disediakan," tuturnya.

Selain itu, hingga kini pemilik wisata Danau Danur Dana belum memberikan keterangan dan konfirmasi lebih lanjut terkait peristiwa nahas tersebut. Pewarta sudah berupaya melalui telepon maupun pesan jejaring WhatsApp, namun tak kunjung menerima konfirmasi. (afi)



Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Paser, Ikhwan Antasari

Mangkrak, Pemkab Paser Diduga Abaikan Fasilitas Pendidikan

PASER - Adanya pembangunan fasilitas pendidikan yang mangkrak di Kecamatan Long Kali yang tidak tuntas dikerjakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser disesalkan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Paser, Ikhwan Antasari, saat menggelar Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, beberapa waktu lalu, lantaran baru diketahui setelah nyaris 10 tahun tidak ditindaklanjuti.

"Kami juga sesalkan dan tak perlu juga menyalahkan pihak pemerintah sini (Paser) dimana tak pernah mengkoordinasikan kembali," kata Ikhwan Antasari.

Untuk diketahui, pengerjaan bangunan itu dilakukan pada 2014 lalu. Bangunan yang saat ini masih berdiri tiang beton saja itu, mulanya diperuntukkan pembangunan SMA di Kecamatan Long Kali. Kala itu anggarannya bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim sebesar Rp 2,2 miliar.

Namun sejak 2016 atau saat kewenangan SMA/SMK sederajat diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, pengerjaan turut dihentikan dan hingga sekarang ini belum ada kejelasan kelanjutan pembangunan.

Pengerjaan bangunan yang mangkrak itu bermula adanya riak-riak dari masyarakat. Ikhwan menyebut pembangunan fasilitas pendidikan itu diperuntukkan untuk SMA, bukan SMK seperti yang banyak terdengar akhir-akhir ini.

"Itu peruntukannya bangunan SMA Negeri 1 Long Kali, relokasi melalui Bankeu," ulasnya.

Lanjut Ikhwan, saat itu seiring pengerjaan bangunan ternyata anggaran yang digelontorkan tidak sesuai dengan desain. Akhirnya hanya berdiri tiang-tiang. Meski kewenangan sudah beralih, namun saat ini juga masih masuk dalam aset Pemkab Paser.

"Belum tercatat (aset) Pemprov Kaltim, otomatis ini harus dihibahkan dulu," terangnya.

DPRD Kabupaten Paser men-

dorong agar Pemkab Paser mencari solusi atas kondisi bangunan tersebut. Beberapa opsi sudah disediakan, seperti alihfungsi atau dilanjutkan dengan mendirikan SMA, sehingga pemanfaatan ke depannya lebih jelas.

"Mau dilanjutkan atau dialihfungsikan saja. Pasalnya pemerintah sudah mengeluarkan anggaran untuk membeli tanah," ulas Ikhwan.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser, Agus Wintoro mengatakan, perihal aset bangunan akan berkoordinasi kembali dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser.

Dikatakannya untuk bangunan SMA harus berdirinya di lahan setidaknya 2 hektar, sementara yang ada saat ini hanya 1,7 hektar. Dengan kondisi tersebut berat untuk memenuhi syarat membangun sekolah baru. "Apabila akan membangun SMA atau sederajat paling tidak harus menambah luasan," tandas Agus. (bs)

Paser Bakal Rutin Gelar Pasar Murah

PASER - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Paser menggelar pasar murah jelang hari raya Iduladha 1444 Hijriah di Outlet Pangan, Jalan RA Kartini, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, yang juga serentak dilaksanakan secara nasional, Senin (26/6/2023).

Kepala DKP Kabupaten Paser, Taharuddin menjelaskan, pasar murah dilaksanakan untuk mengendalikan pasokan dan harga pangan saat hari besar keagamaan. Hal ini dilangsungkan guna menyikapi kenaikan harga bahan pokok di pasaran.

"Supaya kebutuhan yang diperlukan masyarakat dapat dibeli dengan harga yang terjangkau dan pasokan pangan tetap terpenuhi," kata Taharuddin.

Selain pasar murah yang diselenggarakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser turut meluncurkan outlet pangan. Ke depan, pihak Pemkab Paser bakal merencanakan adanya pasar murah setiap empat kali setahun.

"Pasar murah di outlet setahun empat kali dengan harapan harga lebih rendah lima sampai sepuluh dari pada harga pasaran," jelasnya.

Selain hari besar keagamaan dan nasional, outlet akan dibuka sepenuhnya menyesuaikan harga pasar dan tujuan menjaga stabilitas harga di pasar. Pasalnya stok pangan yang disiapkan merupakan hasil pertanian masyarakat yang dikirimkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Kegiatan ini melibatkan ID Food Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan Balikpapan, dan BUMD pangan daerah. "Kami berupaya membawa pangan yang dihasilkan petani ke outlet supaya harganya bersaing. Selama ini dibeli tengkulak, dan tidak bisa menikmati harga yang baik," lanjut dia.

Strateginya, ucap Taharuddin, memberikan bantuan transportasi angkutan barang, sehingga harga di produ-

sen tetap sama di outlet. Begitu juga kebutuhan pangan yang langka di Kabupaten Paser juga disiapkan.

"Nanti ada regulasinya kita atur, petani dan dari hasil pangan mana saja yang bisa berjualan di sini," ucapnya.

Tujuan dibangun outlet pangan ini agar menjaga stabilisasi pasokan sembako dan harga di pasar. Dia mencontohkan seandainya ada komoditas yang langka dan harganya mahal, maka solusinya warga bisa mencari di outlet ini. Tentunya dengan harga normal dan dibatasi penjualannya. "Kurang lebih perannya sebagai rumah inflasi," pungkasnya. (bs)



Kepala DKP Kabupaten Paser, Taharuddin

Cuti Bersama Iduladha, Daftar Ulang PPDB di Paser Ditunda

PASER – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023 di Kabupaten Paser terpaksa diundur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser lantaran waktunya bersamaan dengan cuti bersama hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah.

"Sesuai jadwal awal, pendaftaran ulang mulai dilaksanakan pada 28-30 Juni. Namun karena bersamaan dengan cuti bersama, maka diundur menjadi 3-5 Juli 2023," kata Kepala Disdikbud Kabupaten Paser, M. Yunus Syam, Senin (26/6/2023).

Yunus menjelaskan, PPDB tahap pendaftaran sudah selesai dilaksanakan pada 19-23 Juni 2023 lalu

dan sekarang sudah memasuki tahap daftar ulang. Dalam PPDB ini, kata dia, ada empat jalur penerimaan yakni jalur afirmasi, perpindahan, prestasi, dan zonasi.

Dikemukakannya, pengelompokan penerimaan PPDB dilakukan untuk mengakomodir siswa yang ingin mendaftar melalui jalur berbeda. Sehingga kalau tidak diterima lewat prestasi, bisa lewat zonasi, dan sebagainya.

Yunus menjelaskan, pada pelaksanaan PPDB setiap sekolah, menggunakan dua model yakni dalam jaringan (online) dan luar jaringan (offline). Baik daring maupun luring, Disdikbud Kabupaten Paser tetap

melakukan pendampingan orangtua siswa untuk membantu mengatasi kendala saat pendaftaran.

"PPDB luring dilakukan guna mengatasi kendala teknis yang tidak bisa diatasi dalam sistem," katanya.

Menurutnya, pendaftaran melalui daring dilakukan sebagai bentuk transparansi dalam penerimaan peserta didik baru. Sementara pendaftaran secara luring dilakukan jika terjadi kendala server atau kendala lain.

"Kami berpegang pada ketentuan undang-undang bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi baik pendaftaran melalui daring maupun luring tetap dilayani," kata Yunus. (bs)

Masih Tunggu Usulan Raperda 2023, DPRD Siap Kebut Pembahasan

PPU - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) tahun ini menargetkan pembahasan 10 rancangan peraturan daerah (Raperda) di 2023. Namun hingga pertengahan tahun ini, legislatif masih menunggu adanya usulan dari eksekutif, Pemkab PPU.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD PPU Sudirman menuturkannya bersama Pemkab PPU telah menyepakati jumlah aturan yang akan dibahas. Seperti tahun sebelumnya, targetnya ada 10 raperda, di antaranya adalah 4 raperda inisiatif DPRD PPU dan 6 raperda usulan Pemkab PPU.

Namun begitu, pihaknya masih menunggu usulan raperda dari Pemkab PPU. Hal ini diperlukan untuk dilakukan rapat koordinasi persiapan pembahasan.

"Pemerintah kabupaten belum serahkan usulan raperda. Kalau sudah disampaikan, langsung diagendakan pembahasan melalui Rapat Bapemperda," katanya, Senin (26/6/2023).

Meski sudah masuk akhir semester pertama 2023, Sudirman mengaku optimistis pembahasan raperda rampung tepat waktu. Maka dari itu, pihaknya akan bekerja secara maraton. "Waktunya cukup bisa dikejar dan dibentuk panitia khusus (pansus), anggota dewan yang tidak bahas anggaran bisa bahas raperda," sebutnya.



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Ketua Bapemperda DPRD PPU, Sudirman saat diwawancarai.

Adapun batasan waktu pembahasan seluruh raperda adalah tiga bulan. Tapi masih ada opsi perpanjangan periode pansus dengan waktu enam bulan ke depan pada tahun ini.

"Agar selesai tepat waktu, meskipun saat ini DPRD belum dapat menggelar rapat," imbuh Sudirman.

Lebih lanjut, ia masih belum bisa menyebutkan draf raperda yang saat ini telah masuk, khususnya yang

berasal dari usulan legislatif. Namun begitu, ia memastikan raperda yang akan dibahas tahun ini masih akan berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Pembahasan 10 raperda itu bakal dikebut. Diupayakan sampai akhir tahun ini semua sudah selesai. Karena menyangkut kepentingan umum," pungkasnya. (sbk)

Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim mediakaltimdotcom mediakaltim.com media kaltim

Tahun ini, PPU Kebagian Insentif Penurunan Emisi Karbon Rp 3 M

PPU -Pembkab Penajam Paser Utara (PPU) mendapatkan dana insentif sekira Rp 3 miliar dari Bank Dunia melalui Pemprov Kaltim karena berhasil menurunkan emisi karbon. Dana itu rencananya bakal digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. PPU tahun ini dianggap turut mendapat bagian dari penurunan emisi karbon.

Sebelumnya, Selasa (28/2/2023), Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar, telah menandatangani perjanjian pembayaran insentif untuk Kaltim dalam kerangka REDD+ dan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)-Carbon Fund, sebesar USD 110 juta atau Rp1,7 triliun. "Kita dapat insentif penurunan emisi karbon, jumlahnya Rp 3 miliar di tahun 2023 ini," ungkapnya, Senin (26/6/2023).

Tohar menjelaskan dana insentif penurunan emisi karbon dimasukkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023. Masuknya penganggaran itu nantinya menjadi dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Penajam Paser Utara, selaku pengampu pengguna anggaran dana insentif melaksanakan program dan kegiatan.

Karena berkaitan dengan lingkungan, maka angg-



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Sekcab PPU, Tohar saat diwawancarai.

garan tersebut nantinya akan bagi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta langsung ke beberapa desa. Mereka yang akan menggunakan anggaran tersebut, untuk program lingkungan yang dibutuhkan masyarakat.

"Anggaran dana insentif kinerja pengurangan emisi karbon Gas Rumah Kaca itu, digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan," tutup Tohar. (sbk)

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL
Khusus Taxi Online & Travel

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

AUTO 2000
member of ASTRA
Bontana



Suasana GPM gelaran Pemkot Samarinda, di Jalan Biola.

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Iduladha, Pemkot Samarinda Gelar Pasar Murah

SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang) Samarinda menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam upaya pengendalian inflasi menjelang hari raya Iduladha 1444 Hijriah. GPM itu digelar di Halaman Kantor Dinas Ketapang Samarinda, di Jalan Biola pada Senin (26/6/2023).

Asisten II Sekretariat Daerah Samarinda, Sam Saimun menyebutkan bahwa kegiatan pangan murah ini juga bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga dengan harga yang jauh lebih murah dari pasaran.

"Apalagi ini mendekati Lebaran Iduladha, biasanya harga pada naik semua. Jadi ini merupakan inisiatif Pemkot Samarinda," ucap Sam Saimun.

Sam Saimun juga mengatakan bahwa harga bahan pokok yang ada di gelaran GPM ini tentu lebih terjangkau. Oleh sebab itu, ia pun meminta kepada masyarakat agar memanfaatkan dengan baik.

"Pemkot beri subsidi distribusi, sehingga harganya akan lebih murah dan terjangkau di GPM ini," tambahnya.

Sedikitnya terdapat 26 stand atau booth yang berjualan dalam GPM gelaran Pemkot Samarinda

ini, dan kebanyakan diisi langsung oleh para petani serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

"Ada berbagai kebutuhan pokok di antaranya beras berbagai jenis dan sayuran organik. Terutama ada jenis beras mantik yang berkualitas dan juga murah di sini," paparnya.

Sam Saimun menambahkan bahwa GPM akan dilakukan kembali tergantung situasi dan kondisi ketersediaan pangan juga harga di Pasar Murah. Harapannya, pada pelaksanaan selanjutnya akan dilakukan dengan skala yang lebih besar dan luas.

"Jadi, maksimal akan dilakukan kembali minimal 2 kali dalam tahun ini," pungkasnya. (vic)



Rumah Sakit Haji Darjad yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Samarinda Kota.

Gaji Telat Dibayar, Pegawai RS Haji Darjad Ngadu ke DPRD Samarinda

SAMARINDA - Sebanyak dua puluh pegawai yang bekerja di Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) mengadu kepada DPRD Samarinda terkait dengan keterlambatan pembayaran upah atau gaji mereka.

Oleh karena itu, DPRD Samarinda beserta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna memperjuangkan hak para pegawai tersebut, pada Senin (26/6/2023).

Tak hanya perihal keterlambatan pembayaran gaji saja, para pegawai RSHD juga mengadu terkait dengan sisa gaji yang belum di bayar pada tahun 2022 lalu.

Selain itu, permasalahan gaji tidak sesuai Upah Minimum Kota (UMK), Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak dibayar, pemotongan gaji sepihak, hingga tunggakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan selama 8 bulan juga turut diadukan oleh para pegawai RSHD itu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Sa-

marinda, Sri Puji Astuti mengatakan bahwa hasil dari rapat kali ini pihaknya akan lebih dulu menindak lanjuti laporan para pegawai tersebut.

"Khususnya soal jaminan ketenagakerjaan akan kami tindak lanjuti laporannya sesuai tidak dengan yang dilaporkan ke Pemerintah Provinsi antara yang dibayarkan dan dilaporkan, karena bagian dari pengawasan," ucap Sri Puji saat diwawancarai awak media usai RDP.

Ia juga memaparkan bahwa sebenarnya Disnaker Kota Samarinda telah melakukan mediasi sebanyak dua kali terhadap pihak manajemen RSHD serta para pegawai ini.

Bahkan disebutkan Sri Puji, Disnaker juga telah memberikan sejumlah saran penyelesaian. Namun tidak ada kepastian dan kejelasan dari pihak RSHD terkait pembayaran upah pegawai itu.

"Kami melihat jika ini dilanjutkan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industri), akan berdampak pada kerugian

di karyawan. Besok (27/06/2023) kami akan mengundang kembali pihak manajemen untuk mengetahui alasan tidak segera menyelesaikan permasalahan," jelas Sri Puji.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Samarinda, Wahyono Hadiputro menerangkan bahwa pihaknya memang telah melakukan mediasi pada April 2023 lalu. Hanya saja belum ada penyelesaian pembayaran hak dari pihak rumah sakit.

"Kami sudah melakukan sesuai dengan perundang-undangan, mulai dari pemanggilan, mediasi, anjuran namun masih belum diselesaikan," ungkapnya.

Dijelaskannya, anjuran yang diberikan Disnaker Kota Samarinda yakni untuk segera menyelesaikan semua aduan dari karyawan.

"Tetapi, sampai sekarang pengacara dari karyawan belum mengajukan ke PHI, kami akan segera buat kan risalah jika memang dibutuhkan," pungkasnya. (vic)



Juru Bicara PPIH Pusat Akhmad Fauzin

Hari Ini, Jemaah Mulai Berangkat ke Arafah untuk Wukuf

JAKARTA - Pada hari Senin (26/6/2023) ini, seluruh jemaah haji Indonesia baik haji reguler maupun haji khusus secara bertahap mulai diberangkatkan ke Arafah. Rencananya, mereka akan menjalani ibadah wukuf di Arafah pada 9 Zulhijah 1444 H atau 27 Juni 2023 besok.

"Hari ini, 26 Juni 2023, secara bertahap dari pagi hingga sore nanti, jemaah diberangkatkan ke Arafah untuk menjalani puncak haji, yaitu wukuf, dilanjutkan bermalam di Muzdalifah dan Mina," terang Juru Bicara PPIH Pusat Akhmad Fauzin dalam keterangan persnya di Media Center Haji (MCH) Pusat, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Jemaah haji akan menjalani wukuf di Arafah sebagai rukun haji. Wukuf artinya berhenti. "Ini mengisyaratkan, segala yang semula bergerak, suatu saat akan berhenti. Semua yang hidup akan mati," ujar Fauzin.

Menurutnya, Arafah menjadi lambang Padang Mahsyar, saat manusia menghadap Allah den-

gan status yang sama. Manusia diam, cemas, dan penuh harap saat menunggu keputusan Allah SWT, surga atau neraka. "Arafah adalah lambang maqam ma'rifah billah. Semua perbedaan sirna. Semua berstatus sama, sebagai hamba Allah," jelas dia.

Arafah, lanjut Fauzin, bermakna pengenalan. Di Arafah inilah, ungkapnya, umat Islam diminta untuk berdiam, merenung, berintrospeksi dan bertaubat kepada Allah Swt. Di Arafah, seorang Muslim diharapkan bisa lebih mengenali dirinya dan Allah SWT sebagai Tuhan-nya.

"Wukuf mengisyaratkan pentingnya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi, agar dapat berpikir, menimbang, dan merencanakan agenda kehidupan jangka panjang," ungkap dia.

Sebelum berangkat ke Arafah, Fauzin mengimbau agar jemaah sudah memastikan niat ihramnya dari hotel sebagai Miqat, jemaah khususnya jemaah laki-laki telah mengenakan kain ihram dengan benar.

"Patuhi segala larangan ihram yang telah disampaikan para pembimbing ibadah di kloter dan hotelnya masing-masing. Tetapkan niat dan berdoa memohon kekuatan kepada Allah SWT agar dapat menjalani momentum puncak haji nanti dengan lancar," imbau Fauzin.

Fauzin menambahkan, seluruh jemaah yang sakit dan masih dirawat di KKHI maupun Rumah Sakit Arab Saudi akan disafarwukufkan menggunakan ambulan dan bus. Menurutnya, para jemaah yang disafarwukufkan, selain didampingi petugas kesehatan, para pembimbing ibadah akan mendampingi jemaah menjalani prosesi wukufnya di Arafah.

Terkait pelayanan kesehatan jemaah selama puncak haji, ia menyampaikan, pemerintah telah memastikan kesiapan obat-obatan dan alat kesehatan saat puncak haji di Armina.

"Obat dan alat kesehatan telah siap di pos kesehatan yang berada di Arafah dan Mina, termasuk para tenaga medisnya," imbuh dia. (cha)



Hosted by:



INDONESIA JUSTICE CONFERENCE 2023



Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.J.P.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Subject to confirmation

Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Fookh, S.H., M.Hum
Nasib Mahkamah Konstitusi

Pdt. Dr. Timotius Arifin Tedjasukmana
Senior Pastor of BBI ROCK Ministry

Mark Mudri
Church Believer SA ACT Bible Society Australia
Chair Global Council of Churches International

Fredrik J. Pinakunary, SH., SE.
Advokat

Tony Budidjaja, SH., LL.M, Dipl. CI Arb., FCI Arb.
MANAGING PARTNER SUNDAS INTERNATIONAL LAWYERS
DIRECTOR LAUYERIAL LEGAL JUSTICE CENTER

Dr. Albert Arias, SH., MH
PANGKAP PER UNIVERSITAS TRIKORA

OTHER SPEAKERS:

Pdt. Matius Arif Mirdjaja, SH | Dr. Stefanie Hartanto, SH., M.Kn | Pdt. Kongkin Atmodjo
Dr. Linda Bustan, M.Div. | Yonathan Andre Baskoro, S.H., LL.M., M.AP and many more...

THEME

Restoring Justice, Transforming Nation

Amos 5:24 "Tutaili barilah **keadilan** bergulung-gulung seperti air dan **kebenaran** seperti sungai yang selalu mengalir."



**30 JUNE
- 01 JULY
2023**



**MENORAH HALL
LEMBAH PUJIAN**
JL. ANTASURA - NANGKA UTARA,
DENPASAR UTARA, BALI



**REGISTRATION
FEE:**

1. PROFESIONAL IDR. 300.000
2. PELAJAR DAN MAHASISWA IDR. 200.000



Registration:
<http://tiny.cc/indojc2023>

Information:
Michelle - 082217014339
Junus BM - 0821 1021 1110